



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

**FESTIVAL UPACARA ADAT: Peserta mengikuti Upacara Adat Merti Bumi saat Festival Upacara Adat dan Tradisi Budaya Kabupaten Sleman 2024 di Cangkringan, Sleman, Rabu (19/6/2024). Festival yang menampilkan upacara adat dan tradisi budaya dari 17 kecamatan di Sleman tersebut menjadi salah satu upaya pelestarian seni dan budaya serta ajang promosi tentang keberagaman budaya maupun pariwisata.**

## BERI EFEK JERA

# Disiapkan, Sanksi ASN Main Judol

**JAKARTA (KR)** - Judi online yang telah menjerat berbagai kalangan mendapat perhatian serius dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Terkait kasus tersebut, Kemendagri menyiapkan aturan mengenai sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat judi dalam jaringan atau online (judol).

"Terhadap masalah ini, saya akan minta Setjen (Sekretariat Jenderal) untuk duduk bersama, kira-kira sanksi apa yang diberikan sesuai aturan undang-undang untuk memberikan efek jera," tegas Tito di Kemendagri Jakarta, Rabu (19/6).

Meski demikian, pembahasan sanksi untuk ASN yang terpapar judi daring perlu dibicarakan dengan Kementerian/Lembaga lain. "Jadi kalau bicara ASN ini kan bukan hanya Mendagri. Mengingat Mendagri hubungannya terutama ASN di daerah. Sedang kalau ASN di

tingkat pusat, Mendagri enggak terkait, dan perlu dibicarakan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB), dan Badan Kepegawaian Negara BKN," ujar Tito.

Terkait hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebelumnya mengatakan bahwa pemberantasan kegiatan judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal, harus melibatkan semua kementerian di tanah air. Artinya, penanganan pemberantasan judi on-

line dan pinjaman online ilegal perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua kementerian.

Budi Arie Setiadi melalui keterangan resminya juga mengungkapkan, kegiatan judi online yang saat ini sangat meresahkan dan memberikan dampak buruk kepada masyarakat yang terjerumus ke dalamnya itu berkaitan erat dengan pinjaman online ilegal. Ia menegaskan, pihaknya sudah pernah bilang berkali-kali judi online sama pinjol ilegal ini adik-kakak. "Saudara kandung ini. Dua-duanya disikat," tegasnya.

Budi Arie menandakan, Surat Keputusan (SK) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online secara administrasi telah rampung. Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat segera menandatangani agar Satgas bisa bergerak memberantas judi online. **(Fu)-f**

## TAHUN INI KELUAR

# Izin Tambang untuk PBNU dalam Proses

**JAKARTA (KR)** - Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sedang dalam proses administrasi. IUPK tersebut nantinya akan diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Perizinan buat NU dalam proses administrasi," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6).

Arifin mengungkapkan bahwa proses IUPK NU diperkirakan bisa keluar pada tahun ini. "IUPK Dalam berproses. Kayaknya (tahun ini) iya (keluar IUPK)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilia menyatakan akan segera menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), guna mengoptimalkan peran organisasi keagamaan.

"Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi," ujarnya.

Bahlil mengatakan, proses pem-

buatan izin konsesi tersebut kini sudah memasuki tahap penyelesaian, sehingga dalam waktu dekat izin itu akan segera diteken. "Karena itu tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU, karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya," katanya.

Bahlil beralan pemberian izin usaha kepada PBNU dikarenakan dirinya bangga terhadap organisasi Islam terbesar di dunia asal Indonesia tersebut karena sudah banyak berkontribusi bagi pembangunan negara. "Saya merasa bangga terhadap NU, karena saya lahir dari kandungan seorang ibu yang kader NU," pungkasnya. **(Ant/Has)-d**

## MESKI JUKNIS PPDB SUDAH DISOSIALISASIKAN

# Bingung, Pendaftar Datangi Disdikpora DIY

**YOGYA (KR)** - Meski sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK sudah dilakukan sejak jauh hari, namun masih ada sejumlah orangtua calon peserta didik baru yang kebingungan dan belum bisa mendapatkan pin akun.

Padahal aktivasi token atau PIN akun saat ini sudah memasuki tahap akhir karena akan berakhir Jumat (21/6). Karena tidak mau mengambil risiko, sejumlah orangtua memiliki datang langsung ke Disdikpora DIY dengan harapan bisa mendapatkan kejelasan nasib anaknya.

"Anak saya kemarin sudah ikut ASPD di DIY tapi saat mau mengajukan akun ternyata datanya tidak ditemukan dan masih terdata di Tegal, Jawa Tengah (sekolah asal). Padahal saat pengisian data sudah sesuai, tapi tidak muncul di sini (DIY). Sebagai



KR-Riyana Ekawati

**Para pendaftar didampingi orangtua yang mengalami kesulitan terkait token menunggu dengan tertib di Disdikpora DIY.**

orangtua saya panik dan memutuskan untuk datang ke Disdikpora DIY. Karena saat bertanya di sekolah yang dituju SMKN 6 Yogya, saya disarankan untuk langsung ke Disdikpora DIY biar ada kejelasan," kata warga Kadipiro, Ny Sri saat ditemui KR di Disdikpora DIY, Rabu (19/6).

Sri mengatakan, meski sudah mendapat sosialisasi PPDB model zonasi, tapi adanya beberapa persya-

ratan yang dipenuhi sempat menjadikan dirinya kebingungan. Untungnya ada Posko di Disdikpora DIY yang melayani keluhan orangtua, sehingga dirinya cukup terbantu. Meski harus antre cukup lama karena mendapat nomor antrean 153, ia tidak memperlakukan asalkan anak bisa mendapatkan kejelasan.

Hal senaada diungkapkan Ninik, warga Kapa-

newon Kraton, Kota Yogya. Ninik mengaku sempat bingung karena nilai tambahan anaknya tidak bisa masuk. Padahal pengajuan akun sudah memasuki tahap akhir. Karena tidak mau berspekulasi, ia memutuskan untuk datang ke Disdikpora DIY, dengan harapan anaknya bisa mendapatkan tambahan nilai atas prestasi olimpiade tingkat nasional yang pernah diperoleh.

"Anak saya kan dapat tambahan nilai prestasi tapi nilainya belum masuk. Saat dicek di pengajuan akun belum masuk padahal anak saya ikut olimpiade. Jadi karena bingung dan ingin ada kejelasan langsung datang ke Disdikpora DIY untuk mencari tahu penyebabnya dan mendapatkan solusi," terang Ninik yang akan mendaftarkan anaknya di SMAN 1 Yogyakarta, SMAN 7 Yogyakarta dan SMAN 10 Yogyakarta. **(Ria)-f**

## DIGELAR PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY

### Sinau Sejarah Hadeging Kadipaten Pakualaman

**YOGYA (KR)** - Puncak peringatan 212 tahun Hadeging Kadipaten Pakualaman akan digelar 22 Juni 2024.

Rangkaian kegiatan peringatan 212 tahun Hadeging Kadipaten Pakualaman ini sudah dimulai Mei 2024, diawali selamatan dan ziarah ke makam leluhur di Kotagede dan Girigondo Kulonprogo.

Menyemarakkan acara peringatan berdirinya Kadipaten Pakualaman ini digelar berbagai kegiatan seperti grandprix lukis pelajar tingkat nasional, sayembara macapat, sayembara cipta cengkok macapat tingkat nasional, lomba cipta lagu bocah tingkat nasional, lomba artikel ilmiah tingkat nasional, lomba jemparingan Mataraman, lomba dolanan anak, lomba karawitan daring tingkat nasional, bakti sosial, lomba literasi aksara Jawa tingkat nasional dan lomba tari klasik gagrak Pakualaman dan bazar UMKM.

Dalam rangkaian peringatan 212 tahun Hadeging Kadipaten Pakualaman, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) juga akan menggelar acara "Sinau Sejarah Keistimewan DIY", Sabtu (22/6),



Dr Sri Margana MHum

penampilan kelompok musik.

Sejarawan UGM Dr Sri Margana MHum menilai positif berbagai lomba dan kegiatan untuk memperingati Hadeging Kadipaten Pakualaman. "Ini merupakan hal yang positif agar masyarakat ikut merasa handarbeni, dan menjaga kelestarian budaya yang adiluhung," katanya.

Menurut Margana, posisi Pakualaman dalam keistimewan DIY, sesuai Undang-undang Keistimewan satu paket dengan Kasultanan Yogyakarta, yaitu sebagai pemegang hak istimewa atas pemerintah Provinsi DIY.

"Para pemimpinnya, Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan segala hak dan kewajiban seperti yang diatur di dalamnya," jelasnya.

Namun demikian, agar orang tidak lupa sejarah, menurut Margana, hal itu bisa diatasi dengan pembelajaran sejarah melalui berbagai cara dan bentuk, baik secara formal di institusi pendidikan maupun melalui berbagai kegiatan lain seperti seminar, penulisan buku, film sejarah maupun dalam berbagai pertunjukan seni. **(Wan)**

pukul 13.00-16.00 di Kepatihan Pakualaman, dan ditayangkan *live streaming* melalui channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Acara bertema "Peran Penting Kadipaten Pakualaman dalam Keistimewan DIY" ini akan diawali siteran dilanjutkan dialog keistimewan dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Keistimewan DIY), KPH Suryo Adinegoro (Penghageng Kawedanan Keprajan Puro Pakualaman) dan Dr Sri Margana MHum (Sejarawan UGM) dipandu moderator Wiji Rachmadani. Acara ini juga dimeriahkan tari serta

## KOMISI I DPR RAKER BERSAMA MENLU

### Bahas Lima RUU Kerja Sama Pertahanan

**JAKARTA (KR)** - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Luar (Menlu) Negeri Retno Marsudi dan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra. Raker ini membahas lima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan persetujuan kerja sama di bidang pertahanan dengan lima negara lain.

Lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu yakni Republik India, Republik Prancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.

"Pengesahan pembahasan untuk kepada panja (panitia kerja), mohon persetujuan sekaligus lima-limanya, mohon per-

setujuan Komisi I dan pemerintah terkait pembahasan lima RUU," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6).

Dalam rapat tersebut, sembilan fraksi menyetujui agar kelima RUU itu dibahas ke tingkat selanjutnya setelah memaparkan pandangannya masing-masing. Adapun hal selanjutnya yang akan dibahas yakni pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) terhadap RUU dan DIM terhadap penjelasannya.

Sementara itu, Menlu Retno menjelaskan, RUU kerja sama bidang pertahanan dengan lima negara itu bukan merupakan pakta pertahanan militer, melainkan hanya sebatas kerja sama terkait hal-hal yang menyangkut pertahanan. **(Ant)-d**

## LPG 3 KG TEMBUS 18,7 JUTA METRIK TON

### Subsidi BBM Diusulkan 19,99 Juta Kiloliter

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan rencana penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 19,99 juta kiloliter untuk 2025. Subsidi BBM tersebut terdiri dari minyak tanah sebesar 0,51 sampai 0,55 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 18,33 sampai dengan 19,44 juta kiloliter.

"Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN tahun anggaran 2025 sebesar 18,84 sampai dengan 19,99 juta kiloliter," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6).

Arifin menuturkan, arah kebijakan subsidi BBM adalah pemberian subsidi tetap untuk minyak solar, dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah serta melan-

jutkan roadmap registrasi konsumen pengguna BBM. Kenaikan yang cukup tinggi pada volume BBM bersubsidi dibandingkan dengan outlook 2024, disebabkan oleh metode perhitungan regresi non-linear untuk konsumsi BBM terhadap perkiraan PDB tahun 2025. "Dan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penyaluran BBM dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen," ujarnya.

Selain itu, pada 2024 telah dilakukan penertiban penggunaan barcode ada program subsidi tepat. Selain subsidi BBM, volume subsidi LPG 3 kilogram (kg) yang diusulkan pada tahun 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton. "Mencermati, realisasi sampai dengan Mei 2024 dan outlook 2024, kami mengusulkan volume LPG 3 kg dalam RAPBN tahun anggaran 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton," ucap Arifin. **(Ant/Has)-d**



KR-Effy Widjono Putro

**FOTO BERBUSANA JAWA: Wisatawan berpakaian tradisi Jawa menunggu giliran untuk difoto di depan Kantor Pos Yogyakarta, Selasa (18/6/2024). Jasa foto warga dan wisatawan yang ingin diabadikan dengan busana tradisi menjadi salah satu daya tarik di sepanjang Malioboro hingga sekitar Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta.**